

## Penggunaan Hadis *Māl Al-Mustafād* dan *Qiyās* sebagai Dalil Penetapan Hukum, *Haul*, dan Nisab Zakat Profesi

**Yusefri**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup  
yusefri\_ys@yahoo.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v1i2.247>  
Submitted: 2017-10-25 | Revised: 2017-11-14 | Accepted: 2017-12-01

**Abstract:** The use of the Hadith of *Māl Al-Mustafād* and *Qiyās* as the Law of Establishment, *Haul*, and Nisab of Profession *Zakah*. This article essentially conducts a critical study of the hadith of *māl al-mustafād* which is used as the proposition of the law of obligatory zakat of profession, and the use of *qiyās* as the proposition set the rules of *haul*, *nisab* and rate zakat profession. This study is interesting and important because there are differences in the opinions of ulama in solving some of these issues, which are assumed by their differences in the use of legal arguments (*al-adillat al-syar'iyat*), among them hadith and *qiyās*. The analysis of the hadith of *māl al-mustafād* uses the method of analysis of *takbrīj al-hadīts*. While the analysis on the use of *qiyās* uses the approach of *ushūl al-fiqh* method. The results of this study show that first, hadith on *māl al-mustafād* quality *dba'if* (weak). However, since it has several channels of sanad transmition, the quality rises to the *hasan lighairibi*, and therefore valid as the basis and legal evidence of zakat profession. Secondly, set the rule of *haul*, *nisab*, and rate zakat profession by using *qiyās* to zakat gold, more precisely than *qiyās* to zakat agriculture.

**Keywords:** Zakat Profession, Hadith, *Qiyās*

**Abstrak:** Tulisan ini pada intinya melakukan kajian (penelitian) kritis terhadap hadis *māl al-mustafād* yang digunakan sebagai dalil menetapkan hukum wajib zakat profesi, dan penggunaan *qiyās* sebagai dalil menetapkan ketentuan *haul*, *nisab* dan kadar zakat profesi. Kajian ini menarik dan penting dilakukan karena ditemukan adanya perbedaan pendapat para ahli (ulama) dalam menyelesaikan beberapa persoalan ini, yang diasumsikan karena perbedaan mereka dalam menggunakan dalil-dalil hukum (*al-adillat al-syar'iyat*), diantaranya hadis dan *qiyās*. Analisis terhadap hadis *māl al-mustafād* menggunakan metode analisis *takbrīj al-hadīts*. Sedangkan analisis terhadap penggunaan *qiyās* menggunakan pendekatan metode *ushūl al-fiqh*. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pertama, hadis tentang *māl al-mustafād* berkualitas *dba'if* (lemah). Namun karena memiliki beberapa jalur periwayatan sanad, maka kualitasnya naik menjadi *hasan*

*lighairihi*, dan karenanya valid sebagai dasar dan dalil hukum wajib zakat profesi. Kedua, menetapkan ketentuan *haul*, nisab zakat profesi dengan menggunakan *qiyâs* kepada zakat emas, lebih tepat dari pada *qiyâs* kepada zakat pertanian.

**Kata Kunci:** Zakat Profesi, Hadis, Qiyâs

## Pendahuluan

Salah satu ajaran yang sangat dipentingkan dalam Islam adalah zakat. Ini terlihat dari begitu banyaknya ayat yang membicarakan tentang zakat dengan menggunakan beberapa istilah dan bentuk. Diantaranya dalam bentuk perintah, yang disebut bergandengan dengan perintah shalat.<sup>1</sup> Menurut Yusuf Qardhawi, agama seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan melaksanakan kedua kewajiban, yakni shalat dan zakat.<sup>2</sup>

Meski demikian ternyata, Alquran tidak secara rinci menjelaskan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Misalnya, Alquran surat al-Baqarah/2: 267 menyatakan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S al-Baqarah/2: 267)

Pada ayat di atas, lafal “أنفقوا” perintah (*amr*) “أنفقوا”, yang menurut ulama tafsir, diantaranya Ibn ‘Abbâs (w.78 H), Ibn Jarîr al-Thabarî (w.310 H), dan lainnya, berarti “زكوا وتصدقوا”<sup>3</sup> (zakatkanlah atau sedekahkanlah). Namun kelanjutan lafal ayat itu hanya menyebut “أنفقوا من طيبات ما كسبتم”, artinya zakatkanlah dari hasil usaha yang baik, tanpa merinci jenis harta dari usaha apa saja, dan ketentuan aplikasi lainnya tentang pelaksanaan zakat itu. Ketentuan jenis harta dari usaha apa saja yang wajib terkena zakat, ditemukan dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang kemudian para ulama ahli hukum Islam (*fuqahâ*) terdahulu (masa klasik) merumuskan bahwa hanya ada beberapa jenis harta tertentu saja yang terkena wajib zakat, dan itupun harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu: (a) hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing; (b) dirham atau uang; (c) *al-huliyyyu*, yakni perhiasan; (d) harta hasil perdagangan; (e) barang tambang yaitu berupa emas, perak, besi, timah, dan tembaga, dan; (f) hasil

<sup>1</sup>Misalnya, Q.S al-Baqarah/2: 43: “وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة” Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk’

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994, h. 71

<sup>3</sup> Al-Thabarî, *Jâmi` al-Bayân fî Ta`nîl al-Qur`ân*, Juz V, (t.tp: Mu`ssasat al-Risâlah, 1420 H/2000 M), h. 555

pertanian; (gandum dan *ṣya'ir*), dan buah-buahan (korma dan anggur kering/kismis).<sup>4</sup>

Akan tetapi jika dilihat konteks kehidupan umat Islam saat ini, persoalan yang muncul terkait dengan zakat ini adalah: “apakah jenis harta yang wajib dizakati tersebut, terbatas hanya pada jenis harta sebagaimana terdapat pada teks-teks *nash* yang ada, dan sudah disepakati oleh ulama terdahulu tersebut”? Bagaimana dengan kondisi sekarang, dimana orang tidak hanya memperoleh harta dari hasil usaha pertanian, perdagangan, perternakan dan pertambangan, tetapi juga dari hasil jasa profesi (keahlian) yang dimiliki seseorang; apakah harta dari hasil usaha profesi tersebut termasuk jenis harta yang wajib dizakati.? Oleh karena tidak adanya *nash* yang secara eksplisit (*ibârat al-nash*) dan tegas menjelaskan tentang ketentuan harta yang diperoleh dari jasa profesi ini ini, maka ulama dan atau lembaga keulamaan tidak luput dari adanya perbedaan pendapat dalam menyikapi persoalan ini. Sebagian ulama komtemporer berpendapat bahwa hasil usaha jasa profesi wajib dizakati. Mereka itu antara lain, Yûsûf Qardhâwî Syeikh Muham-mad Abû Zahrah, Muhammad Al-Ghâzalî, Abd al-Wahâb, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Keputusan Nomor 3 tahun 2003, dan Dewan Syariah PKS. Diantara argumentasi normatif yang dikemukakan dalil Alquran *al-Baqarah/2*: “أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ”. Argumentasi lain yang dikemukakan oleh kalangan yang berpendapat wajib zakat profesi adalah bahwa harta dari hasil usaha profesi merupakan atau termasuk *māl al-mutafad*, yakni berdasarkan dalil hadis Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ. رواه الترمذی<sup>5</sup>

Dari Ibnu 'Umar r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memanfaatkan harta maka ia tidak wajib bayar zakat kecuali sudah sampai satu tahun.” (H.R. Turmidzî)

Sementara itu dari sisi lain, yakni dalam kaitannya dengan ketentuan *haul*, nisab dan kadar zakat profesi, kelihatannya kalangan yang mewajibkan zakat profesi memiliki pendapat yang berbeda-beda. Sebagian ada berpendapat bahwa

<sup>4</sup>Al-Syirâzî, *Al-Tanbîyah fî al-fiqh al-Syâfi'i* (t.tp: Ālim al-Kutub, t.th), h. 55-59; Ibn al-Qudâmah, Juz II, *al-Mughnî*, Kairo: Makatabah al-Qahira, 1388 H/ 1968 M, h. 429-447; Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zaad al-Ma'at fî Hadi Khair al-'Ibad*, Juz II, (Beirût: Mua'ssasat al-Risâlah, 1415 H/1994 M), h. 5

<sup>5</sup>Al-Turmudzî, Abû 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Tsaurah bin Mûsa bin al-Dhahhâk, *Sunan al-Turmudzî*, Juz III (Mesir: Syirkat Maktabat wa Mathba'ât Mushthfa a l-Bâbî al-Halabî, 1395 H/1975 M), h. 16

ketentuan *haul* dan nisab zakat profesi sama dengan ketentuan *haul* dan nisab zakat pertanian. Maksudnya, pada zakat profesi tidak diberlakukan ketentuan *haul* sebagaimana pada zakat pertanian, dan nisabnya pun disamakan dengan nisab hasil pertanian, tapi kadarnya disamakan dengan kadar zakat emas<sup>6</sup> Sementara itu, ada sebagian yang menetapkan adanya ketentuan *haul*, nisab dan kadar zakat profesi, sebagaimana atau sama halnya dengan zakat emas.<sup>7</sup> Ringkasnya terbaca, bahwa dalam hal menetapkan ketentuan *haul*, *nisab* dan kadar zakat profesi, pendapat ini menggunakan kiyas (*al-qiyās*), yakni atau mengkiyaskannya kepada ketentuan zakat pertanian dan atau zakat emas.

Dalam kajian teori hukum Islam (*ushûl al-fiqh*), hadis (*sunnah*) memang disepakati mayoritas ulama sebagai sumber hukum *syara'* kedua setelah Alquran. Akan tetapi, mereka juga mengakui bahwa tidak semua hadis dapat diterima (*maqbul*) dan dijadikan hujjah (argumentasi) normatif yang valid untuk menetapkan suatu hukum. Hal itu karena secara teoritis, tingkatan kualitas hadis bervariasi, yaitu ada yang berkualitas *shahîh*, *hasan*, *dha'îf* dan *maudhû*. Mereka sepakat bahwa hanya hadis yang berkualitas *shahîh* dan *hasan* yang dapat dijadikan hujjah menetapkan hukum. Demikian pula hal dengan *qiyās*. Para ulama ahli hukum Islam, umumnya mengakui dan menerima *qiyās* dijadikan dalil menetapkan suatu hukum. Namun begitu, mereka juga telah menyepakati adanya beberapa ketentuan atau kaidah (rukun dan syarat *qiyās*) yang harus terpenuhi agar ia dapat diterapkan dalam merumuskan suatu hukum. Hal ini tentu dimaksudkan agar hukum dapat dirumuskan secara tepat, cermat, tidak alasan, dan sesuai dengan kehendak *syār'*. Penggunaan *qiyās* yang tidak memenuhi ketentuan kaidah, maka *qiyās* tersebut tidak sah, batal dan tidak dapat dijadikan hujjah.

Jika demikian halnya, maka terlepas dari pro dan kontra tentang adanya dua pendapat tentang persoalan zakat profesi ini, yang jelas dari sudut kaca mata kajian hukum Islam, studi terhadap penggunaan hadis dan *qiyās* yang dijadikan dalil penetapan hukum, nisab dan haul zakat profesi, layak dan menarik untuk diteliti secara ilmiah, dan objektif. Dalam hal ini, objek kajian yang diteliti difokuskan pada dua permasalahan, yakni (a) Bagaimanakah ketepatan penggunaan hadis tentang *mâl al-mustafad* yang dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum wajib zakat profesi, dan (b) Bagaimanakah ketepatan penggunaan *qiyās* sebagai dalil dalam penetapan ketentuan *nisab* dan *haul* zakat profesi?

Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini menggunakan dua metode pendekatan analisis. *Pertama*, untuk menganalisis ketepatan penggunaan hadis

<sup>6</sup> Lihat, Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera*, Bandung: Harakatuna Publishing, 2006

<sup>7</sup> Lihat, Fatwa MUI Fatwa MUI Nomor: 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan; Musyawarah Nasional Tarjih XXV 1421 H/ 2000 M

tentang *mâl al-mustafad* sebagai dalil penetapan hukum wajib zakat profesi, penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisis *takhrîj al-hadîts*, yaitu suatu analisis terhadap suatu hadis dengan tahapan: (a) menemukan jalur-jalur periwayatan hadis ke sumber aslinya, yang dalam kaitan ini dibatasi pada kitab-kitab hadis *mu'tabarab* yang dikenal dengan *Kutub al-Tis'ah*, (kitab *Shahîh* al-Bukhârî, *Shahîh* Muslim, *Sunan* al-Turmudzî, Abû Dâwûd, Al-Nasâ'î, Ibn Mâjah, al-Darâmî, *Musnad* Ahmad bin Hanbal, *Muwatththa' Mâlik*) dan kitab *Sunan al-Kubra* karangan imam al-Baihaqî, dan kitab *Mu'jam al-Kabîr* imam al-Thabrânî, dan (b) mengkritisi kualitas sanad (periwayat) dan *matn* hadis dengan mengacu kepada kaidah kesahihan hadis. *Kedua*, untuk menganalisis ketepatan penggunaan qiyas sebagai dalil penetapan nisab dan haul zakat profesi, kajian ini menggunakan pendekatan analisis *ushûl al-fiqh*. Maksudnya, menganalisis suatu objek dengan menggunakan frame atau alur pikir yang mengacu kepada ketentuan, kaidah dan metode yang terdapat dalam *ushûl al-fiqh*.

### **Analisis Penggunaan Dalil Hadis Tentang *Mâl al-Mustafâd***

Untuk memastikan ketepatan penggunaan hadis tentang *mâl al-ustafâd* sebagai dasar dan atau dalil hukum wajib zakat profesi, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan kajian kritis terhadap tingkat kualitas hadis tersebut baik dari aspek sanad yang mencakup jalur-jalur periwayatan dan kualitas periwayatannya maupun dari aspek *matmya*.

#### ***Jalur Periwatyan***

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa bunyi redaksi (lafal) *matn* hadis tentang *mâl al-ustafâd* adalah:

مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

“Siapa memperoleh (dari pemananfaatan) harta maka ia tidak wajib bayar zakat kecuali sudah sampai satu tahun.”

Berdasarkan penelusuran pada kitab *Mu'jam al-Mufabras li al-fâzih al-Sunnah al-Nabawi* dan CD Room *Maktabah al-Syâmilah*, terdeteksi bahwa hadis yang redaksi (lafal) *matmya* sebagaimana tersebut di atas ternyata hanya diriwayatkan oleh imam al-Tirmidzî (w. 279 H) dalam kitab “*al-Sunan*”, al-Thabrânî (w.360 H) dalam kitab “*Al-Mu'jam al-Kubrâ*” dan al-Baihaqî (w. 458 H) dalam kitab “*al-Sunan al-Kubrâ*”.<sup>8</sup> Dalam kitab “*al-Sunan*”nya, imam al-Tirmidzî memuat hadis tersebut dalam bab “*Majâ'a la zaka'ata 'ala al-mâl al-mutafâd*” melalui dua jalur periwayatan. Sedangkan imam al-Thabrânî dalam kitabnya “*Al-Mu'jam al-Kubrâ*”, meletakkannya dalam bab “*Umm Sa'ad al-Anshâri imra'at Zaid bin Tsâbit*”. Adapun imam al-Baihaqî dalam kitabnya “*al-Sunan al-Kubrâ*” meletakkan

<sup>8</sup> A. J. Wensinck, *Al-Mu'jam al-Mufabras li Alfâzih al-Sunnah al-Nabawi*, Jilid V, Leiden: E.J Brill, 1965, h. 214

hadis tersebut pada bab “*Laya'taqidu aliahim bima istafaduhu min ghair*”. Selengkapnya jalur-jalur periwayatan hadis tersebut sebagai berikut.

Riwayat Imam al-Tirmidzî yang pertama:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» رواه الترمذی<sup>9</sup>

Jika dianalisis, urutan periwayat dan sanad dalam hadis riwayat Imam al-Tirmidzî pertama di atas, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Nama Periwayat	Urutan Sebagai Periwayat	Urutan Sebagai Sanad
Ibn `Umar	Periwayat I	Sanad VI
Zaid bin Aslâm	Periwayat II	Sanad V
Abd al-Rahmân bin Zaid bin Aslâm	Periwayat III	Sanad IV
Hârûn bin Shâlih al-Thalhîy	Periwayat IV	Sanad III
Yahya bin Mûsa	Periwayat V	Sanad II
Al-Tirmidzî	Periwayat VI	Sanad I

Selanjutnya riwayat imam al-Tirmidzî yang kedua:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أُبَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» رواه الترمذی<sup>10</sup>

Jika diurai urutan periwayat dan sanad dalam hadis riwayat Imam al-Tirmidzî kedua di atas, dapat dikemukakan sebagai berikut.

Nama Periwayat	Urutan Sebagai Periwayat	Urutan Sebagai Sanad
Ibn `Umar	Periwayat I	Sanad VI
Nâfi'	Periwayat II	Sanad V
Ayyûb	Periwayat III	Sanad IV
Abd al-Wahhâb al-Tsaqafi	Periwayat IV	Sanad III
Muhammad bin Basysyâr	Periwayat V	Sanad II
Al-Tirmidzî	Periwayat VI	Sanad I

Itulah dua buah hadis riwayat imam al-Tirmidzî yang redaksi *matn*-nya menyebut tentang *mâl al-mustafad*. Setiap riwayat terlihat bahwa *matn* hadis tersebut hanya diriwayatkan dari seorang ke seorang di setiap tingkatannya.

<sup>9</sup>Al-Tirmidzî, *Loc. Cit*

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 17

Dengan demikian jika dilihat dari aspek kuantitas periwayatnya, maka kedua hadis riwayat imam al-Tirmidzî tersebut berstatus *ahâd*. Selanjutnya dari sisi lambang periwayatan yang digunakan ketika terjadi proses “penerimaan dan penyampaian hadis/ *tabammul wa al-ada*”, tercatat ada lafal *haddatsanâ* (حَدَّثَنَا) dan ‘*an* (عَنْ). Itu berarti terjadi keragaman dalam metode periwayatan.

Berikutnya, jalur sanad dan teks *matn* hadis riwayat imam al-Baihaqî berkaitan tentang *mâl al-Mustafad*, sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَهَيْثَمٍ، ثنا إِبرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، ثنا الْأَشْجَعِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَّيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " مَنْ اسْتَفَادَ مَا لَا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " رواه البيهقي<sup>11</sup>

Urutan periwayat dan sanad dalam hadis riwayat imam al-Baihaqî di atas, dapat dikemukakan sebagai berikut.

Nama Periwayat	Urutan Sebagai Periwayat	Urutan Sebagai Sanad
Ibn `Umar	Periwayat I	Sanad X
Nâfi`	Periwayat II	Sanad IX
Ayyûb	Periwayat III	Sanad VIII
Sufyân	Periwayat IV	Sanad VII
Al-Asyja`iy	Periwayat V	Sanad VI
Ibrahim bin Abû Laîts	Periwayat VI	Sanad V
Yazid bin al-Haitsami	Periwayat VII	Sanad IV
Ali bin al-Hamsyâdz	Periwayat VIII	Sanad III
Abû Abd Allah al- <u>H</u> afizh	Periwayat IX	Sanad II
Al-Baihaqî	Periwayat X	Sanad I

Dari daftar nama di atas, terlihat bahwa periwayatan hadis juga hanya *ahâd*. Adapun lafal yang digunakan ketika terjadi proses “penerimaan dan penyampaian hadis” *haddatsanâ* (حَدَّثَنَا), (أَخْبَرَنَا) dan ‘*an* (عَنْ).

Adapun jalur sanad dan teks *matn* hadis riwayat imam al-Thabrânî berkaitan tentang *mâl al-Mustafad*, sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَائِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَنبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ أُمِّ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ، امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَتْ: قَالَ

<sup>11</sup> Al-Baihaqî, Ahmad bin al-Hasan bin ‘Ali bin Mûsa al-Khurrasânî, *Sunan al-Kubra*, Juz IV, (Beirût-Lebanon; Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 174

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَسَّ عَلَيَّ مِنَ اسْتَفَادَ مَا لَا زَكَاةَ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. رواه الطبراني<sup>12</sup>.

Urutan periwayat dan sanad dalam hadis riwayat imam al-Thabrânî di atas, dapat dikemukakan sebagai berikut.

Nama Periwayat	Urutan Sebagai Periwayat	Urutan Sebagai Sanad
Umm al-Sa'd al-Ansyâriyyah	Periwayat I	Sanad VII
Muhammad bin Jazan	Periwayat II	Sanad VI
'Anbasah	Periwayat III	Sanad V
Sa'id bin Zakariya	Periwayat IV	Sanad IV
Abu al-Rubai`	Periwayat V	Sanad III
M. bin 'Abd Allah al-Khadhramî	Periwayat VI	Sanad II
Al-Thabrânî	Periwayat VII	Sanad I

Dari daftar nama di atas, terlihat bahwa periwayatan hadis tersebut pada setiap tingkatannya berlangsung secara *abâd*. Adapun dari sisi lambang periwayatan yang digunakan ketika terjadi proses "*tahammul wa al-ada'*", tercatat ada lafal *haddatsanâ* (حَدَّثْنَا) dan *'an* (عَنْ). Itu berarti terjadi keragaman dalam metode periwayatan.

Demikian empat jalur *sanad* hadis (2 buah riwayat Turmudzî dan, satu riwayat imam al-Thabrânî dan imam al-Baihaqi) yang redaksi *matn*nya menyebutkan persoalan tentang *mâl al-mustafad*.

### ***Kualitas Sanad Hadis Riwayat Pertama Imam Tirmidzî***

Penilaian-penilaian yang diberikan oleh para ulama hadis dan ahli kritik hadis terhadap para periwayat dalam jalur sanad riwayat imam al-Turmudzî yang pertama dapat dirangkum dalam tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1  
Rangkuman Penilaian Para Ahli Kirik Hadis<sup>13</sup> Terhadap Para Periwayat

<sup>12</sup> Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb bin Mathîr al-Lakhmî, Abû al-Qâsim al-Thabrânî, *Al-Mu'jam al-Kabîr*, Juz XXV (Kairo: Dâr al-Nasyr Maktabah Ibn Taymiyyah, 1415/1994), h. 137

<sup>13</sup> Yûsuf ibn `Abd al-Rahmân ibn Yûsuf Abû al-Hajjâj Jamâl al-Dîn ibn al-Zakî Abî Muhammad al-Qâdhî al-Kilabî al-Mizzî, selanjutnya ditulis al-Mizzî, *Tabdzîb al-Kamâl fî Asmâ al-Rijâl*, Juz XVI, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1400 H/1980 M), h. 250-252; Juz IX, h. 32-34; Juz XXX, h. 90; Juz XVII, h. 114-119; Juz X, h. 12-17 Ahmad bin `Ali bin Hajar Al-Asqallânî, selanjutnya ditulis Al-Asqallânî, *Taqrîb al-Tabdzîb*, Juz I, (Suriya: Dâr al-Rasyîd, 1406 H/1986 M), h. 500; Juz I, *Op. Cit*, h. 569; Juz I, h. 222; Al-Asqallânî, *Tabdzîb al-Tabdzîb*, Juz XI, (India: Mathbaat Dâ'irat al-Ma'ârif al-Nizhâmiyah, 1326 H).h. 290; Juz VI, h. 178-179; Jilid III, h. 395-396; Al-Asqallânî, *Al-Ishâbah fî Tamyiz al-Shahâbah*, Jilid (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah 1415 H). H. 156-160; Muhammad ibn Hibbân ibn Ahmad ibn Mu'adz ibn Ma'dan al-Tamîmî Abû Hâtîm al-Darâmî al-Bustî, selanjutnya ditulis Ibn Hibbân, *Al-Tsiqât li Hibbân*, Juz IX,

## Dalam Jalur Sanad Riwayat Pertama Imam al-Tirmidzî

Nama Periwiyat	Urutan Sebagai Periwiyat	Penilaian Para Ulama Hadis & Ahli Kritik Hadis
Ibn `Umar (w.73 H)	Periwiyat I	Sahabat terkenal, dan ahli hadis.
Zaid bin Aslâm (w.136 H)	Periwiyat II	<i>Tsiqab</i> .
Abd al-Rahmân bin Zaid bin Aslâm (w. 182 H)	Periwiyat III	<i>Dba'if</i> , dan <i>Dba'if al-Hadîts</i> , <i>Laisa hadîtsuhu bisyai'in</i> , <i>dba'if</i> , <i>Laisa biqawi al-hadîts</i> , <i>kâna shâliban wa fî nafsibi wa hadîtsuhu wâbiyan</i> , <i>Aulâdan Zaid bin Alam kullubum dba'if</i> , <i>dba'if jiddan</i>
Hârûn bin Shâlih al-Thalhîy (w. 210 H)	Periwiyat IV	<i>Tsiqab</i> , <i>Shadûq</i>
Yahya bin Mûsa (w. 240 H)	Periwiyat V	<i>Tsiqab</i> , <i>Tsiqab Ma`mun</i> , “ <i>Kâna min al-Tsiqat al-Nâs</i>
Al-Tirmidzî (w. 277 H)	Periwiyat VI	<i>Tsiqab</i> , <i>al-imam hâfîzh</i>

Berdasarkan data-data dan uraian tentang biografi para periwiyat yang ada dalam jalur *sanad* hadis riwayat imam Tirmidzî yang pertama ini, yakni mulai dari imam al-Tirmidzî yang sekaligus sebagai *mukbarrîj*, hingga kepada Nabi SAW, terlihat ada satu diantaranya, yaitu ‘Abd al-Rahmân bin Zain bin Aslam, yang dinilai oleh para ulama ahli kritikus hadis memiliki ketercelaan dari aspek *kedhabithannya* (tidak *dhâbith* karena hafalan yang buruk dan lemah. Dengan demikian sanad hadis imam al-Tirmidzî yang pertama ini tidak memenuhi syarat sebagai sanad yang sahih, atau dapat dikatakan sanad hadisnya *dba'if* (lemah). Berdasarkan kaidah kesahihan hadis, maka hadis pertama riwayat imam al-Tirmidzî dengan lafal matn sebagaimana tersebut dapat dilategrikan sebagai hadis *dba'if*.

(t.tp: Dar al-Ma`arif al-`Utsmaniyah, 1393 H/1973 M), h. 153; Juz IX. h. 239; Abû Muhammad ‘Abd al-Rahmân ibn Muhammad ibn Idrîs ibn al-Mundzir al-Tamîmî al-Hanzhalî al-Râzî ibn Abî Hâtîm, selanjutnya ditulis Abû Hâtîm al-Râzî, *Al-Jarh wa al-Ta`dîl*, Jilid IX, (Beirût: dar Ihyâ` al-Turâts, 1271 H/1952 M), h. 188; Juz IX, h. 91; Juz V, h. 233; Juz III, h. 555; Syam al-Dîn Abû ‘Abd Allah Muḥammad bin Ahmad bin Utsmân Qaymâz al-Dzahabî, selanjutnya ditulis al-Dzahabî, *Al-Kâsyif fî Ma`rifat Manlahu Rivâyat fî al-Kutub al-Sittah*, Juz II, (Beirût-Lebanon: Dâr al-Ma`rifat li al-Thabâ`at wa al-Nasyr, (Jedah: Dâr al-Qiblat li al-Tsaqâfat al-Islâmiyat – Muassasat ‘Ulûm al-Qur`an, 1413 H/1992 H), h. 330; Muḥammad Ismâ’îl bin al-Mughîrah al-Bukhârî, selanjutnya ditulis al-Bukhârî, *Al-Târikh al-Kabîr li al-Bukhârî*, Juz V, (Hydrabat: Dâr al-Ma`ârif al-`Usmâniyah, t.th). h. 284

***Kualitas Sanad Hadis Riwayat Kedua Imam al-Tirmidzî***

Berikutnya penilaian yang diberikan oleh para ulama hadis dan ahli kritik hadis terhadap para periwayat dalam jalur sanad riwayat imam al-Turmidzî yang ini dapat dirangkum dalam tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2  
Rangkuman Penilaian Para Ahli Kritik Hadis<sup>14</sup> Terhadap Para Periwayat  
Dalam Jalur Sanad Riwayat Kedua Imam al-Turmidzî

Nama Periwayat	Urutan Sebagai Periwayat	Penilaian Para Ulama Ahli Kritik Hadis
Ibn `Umar	Periwayat I	Sahabat terkenal, dan ahli hadis.
Nâfi' <i>maula</i> Ibn Umar (w.117 H)	Periwayat II	<i>Tsiqah, tsiqah tsabat, la a'lam illa kbair, tsiqah tsabat faqîh masybûr</i>
Ayyûb (w.130 H)	Periwayat III	<i>Tsiqa tsabat bujjab, tsiqah la yus`alu 'an mitslibi, tsiqah tsabat</i>
Abd al-Wahhâb al-Tsaqafî (w. 194 H)	Periwayat IV	<i>Tsiqah, tsiqat tsiqah, fîbi dha'f</i>
Muhammad bin Basysyâr (w. 252 H)	Periwayat V	<i>tsiqah, katsir al-hadîts, shadûq, sbâlih lâ ba'sa bibi, tsiqat shudûq</i>
Al-Tirmidzî (w. 277 H)	Periwayat VI	<i>Tsiqah, al-imam hâfîz</i>

Berdasarkan data-data dan uraian tentang biografi para periwayat yang ada dalam jalur *sanad* hadis riwayat imam Tirmidzî kedua di atas, terlihat ada satu periwayat, yakni Abd al-Wahhâb al-Tsaqafî (w. 194 H), yang mendapat penilaian. Sebagian ada yang menilainya sebagai seorang periwayat yang *tsiqah*, namun sebagian lain adanya menilainya *dha'if*. Sesuai dengan kaidah *al-Jarh wa Ta'dîl*, maka aspek ketrercelaan (*tajrîb*) yang harus lebih dimenangkan dari pada aspek *ta'dîl*. Oleh karenanya jalur sanad hadis imam al-Turmidzî yang kedua kedua ini, juga tidak memenuhi syarat sanad yang sah, atau dinyatakan sandanya *dha'if*.

<sup>14</sup>Ibid; (Al-Mizzî, Juz X, h. 511-518; Juz XVIII, h. 503-508; Jilid, III, h. 457-463; Juz XIX h. 298-304; Abû Hâtîm al-Râzî, Juz VII, h. 214; Juz VI, h. 71; Juz II, h. 255; Juz VIII, h. 453; Ibn Habbân, Juz IX, h. 111; Juz V, h. 467; Al-Dzahabî, *al-Tabdîz*, Jilid IX, *Op. Cit.*, h. 70-73; Jilid VI, h; Al-Dzahabî, *Taqrîb* Jilid I, h. 260; Juz I, h. 558; Al-Dzahabî, *al-Kasyîb*, Jilid I, h. 260; Al-Bukhari, Jilid I, h. 409); Al-Dzahabî, *Al-Mizân wa al-Itidâl*, Juz III (Beirût-Lebanon: Dâr al-Ma'rîfat li al-Thabâ'at wa al-Nasyr, 1382 H/1963) h. 490; Al-Dzahabî, *Tadzâkirat al-Huffâz*, Jilid VI, (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H/1998 M). H. 69

**Kualitas Sanad Hadis Riwayat Imam al-Baihaqî**

Selanjutnya penilaian yang diberikan oleh para ulama hadis dan ahli kritik hadis terhadap para periwayat dalam jalur sanad riwayat imam al-Baihaqî dapat dirangkum dalam tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3

Rangkuman Penilaian Para Ahli Kirik Hadis<sup>15</sup> Terhadap Para Periwayat  
Dalam Jalur Sanad Riwayat Imam al-Baihaqî

Nama Periwayat	Urutan Sebagai Periwayat	Penilaian Para Ulama Ahli Kritik Hadis
Ibn `Umar	Periwayat I	<i>Sahabat terkenal, dan ahli hadis.</i>
Nâfi`	Periwayat II	<i>Tsiqah, tsiqah tsabat, la a`lam illa kbair, tsiqah tsabat faqîh masybûr</i>
Abû Ayyûb	Periwayat III	<i>Tsiqa tsabat hujjab, tsiqah la yus`alu `an mitslibi, tsiqah tsabat</i>
Sufyân (w.161 H)	Periwayat IV	<i>amîr al-mu`minîn fi al-hadîts, Kâna imâm min aimmat al-muslimin, `ulama min a`lam al-din, al-îqan, hafizh, dhabith, wara` dan zûhud, "tsiqat al-ma`mûn." kâna min sadât al-nâs faqîhan wa wara`an wa îqanân</i>
Al-Asyja`iy (w.182 H)	Periwayat V	<i>shâlih tsiqah, "tsiqah ma`mun, al-imâm, al-hafizh, tsabat, tsiqah</i>
Ibrahim bin Abû Laîts (w. 234 H)	Periwayat VI	<i>"yudha`afu fi al-hadîts, qad taraka al-nâs hadîtsabu fi hayâtibi, arjû annahu lâba`sa bihi, matruk al-hadîts, kana yukdzabu `isyri`na sanah, tsiqah</i>

<sup>15</sup>Ibid., (Al-Bukhârî, Juz V, h. 390; Abû Hâtîm, Juz V, h. 323-324, Juz VIII, h. 453; Al-Mizzî, Jilid XIX, h. 108-110, 298-304; Jilid XI, h. 154-169; Al-Dzahabî, *Al-Kâsyif*, Juz I, h. 684; Juz I, h. 449; Al-Dzahabî, *Tadzkirat al-Huffâz*, Juz I, h. 227; Juz I, h. 151-153, Juz III, h. 162-163; Al-Asqallânî, *Thadzîb al-Tabdzîb*, Juz VII, h. 34-35; Juz IV, h. 111-115; *Thadzîb al-Tabdzîb*, Juz I, h. 244; Al-Dzahabî, *Al-Taqrîb*, Juz I, h. 558; Ibn Hibban, Juz V, h. 467) Abû Bakar Ahmad al-Baihaqî, *Al-Sunan al-Kubro*, Jilid I, (Beirût: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 2010), h. 5; Abû Bakar Ahmad al-Baihaqî, *Ma`rifat al-Sunan wa al-Asar*, (Damaskus: Dâr Qutaibah, 1999), h. 212; Al-Dzahabî, *Siyar A`lam al-Nubalâ*, Jilid XVIII, (Muasasah al- Risâlah, cetakan ketiga 1405 H 1985 M), 169; Jilid XII, h. 21-22; Jilid VII, h. 455; Abû `Abd Allah al-Hâkim al-Naisâbûrî, *Al-Mustadrak `ala shahihain*, Jilid I, (Kairo:Dâr al-Haramain li al-Thba`ah wa al-Tauzi`, 1997), h. 6-8; Juz III, h. 50; Abû Bakar Ahmad bin Ali bin Tsâbit bin Ahmad bin Mahdî al-Khathîb al-Baghdâdî, selanjutnya ditulis Al-Khathîb al-Baghdâdî, *Târikh Baghdâd* Juz XIV, ( Beirût: Dâr al-Gharbi al-Islâmî, 1422 H/2002), h. 349; Jamâl al-Dîn Abû al-Farj `Abd al-Rahmân bin Ali bin Muhammad al-Jauzî, *Al-Muntazham fi Târikh al-Umam wa al-Mulûk*, Juz XII, (Beirût: Dâr al-Kutub al-`Ilmyah 1992 M/1412 H), h. 376; Abû Ahmad bin `Adî al-Jurjânî, *Al-Kâmil fi Dhu`afâ` al-Rijâl*, Juz I, (Beirût-Lebanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/1997M, h. 433; Al-Asqallânî, *Lisân al-Mizân*, Juz I (Beirût-Lebanon, Mu`assasat A`lamî lilmatbû`ât, 1390 H/197), h. 93

Yazid bin al-Haitsami wafat 284 H	Periwayat VII	<i>Tsiqab.</i>
Ali bin al-Hamsyâdz (w.338 H)	Periwayat VIII	<i>'adl, mutqin, al-stiqab al-hâfiẓh</i>
Abû Abd Allah al- Hafizh (w.405 H)	Periwayat IX	<i>Tsiqab, wara', muhaddits</i>
Al-Baihaqî (w. 458 H)	Periwayat X	<i>al-Imam al-Muslimin, al-Hafizh, al-'alim fi al-fiqh, abl al-badits.</i>

### ***Kualitas Sanad Hadis Riwayat Imam Thabrani***

Adapun deskripsi penilaian yang diberikan oleh para ulama hadis dan ahli kritik hadis terhadap para periwayat dalam jalur sanad riwayat imam al-Baihaqî dapat dirangkum dalam tabel 4 sebagai berikut

Tabel 4

Rangkuman Penilaian Para Ahli Kirik Hadis<sup>16</sup> Terhadap Para Periwayat Dalam Jalur Sanad Riwayat Imam al-Thabrânî

Nama Periwayat	Urutan Sebagai Periwayat	Penilaian Para Ulama Ahli Kritik Hadis
Umm al-Sa'd al-Ansyâriyyah	Periwayat I	Sahabat Nabi SAW
Muhammad bin Jazan	Periwayat II	<i>"munkar al-badits lâ yuktab baditsubu."</i> <i>"matrûk al-badits lâ yuktab baditsubu"</i> . <i>"al-dbu`afâ wa al-matrûkin "laisa baditsubu bi syai`in."</i>

<sup>16</sup> Ibid., (Al-Dzahabî, *Siyar A'lâm al-Nubalâ`*, Juz XI, h. 28; Jilid XII, h. 201-208; Abu Hatim, Juz VII, h. 298; Juz IV, h. 23, 113; Juz VI, h. 402-403; Juz VII, h. 267; Al-Mizzî, Juz II, h. 423-424; Juz X, h. 435-437; Juz XXII, h. 416-419; Juz XXV, h. 206-207; Al-Dzahabî, *Al-Kâsyif*, Juz I, h. 436; *Mizân al-I'tidal*, Juz III, h. 301; *Tadzkirah al-Huffâẓh*, Juz I, h. 171; Al-Asqallânî, *Tabdẓf al-Tabdẓf*, Juz IV, h. 30; Juz IV, h. 141; *Lisan al-Mizân*, Juz VII, h. 276; *Al-Isti'âb fi Ma'rifat al-Ashbâh*, Juz IV, h. 1938; Al-Bukhârî, *Târikh al-Kabîr*, Juz III, h. 474; Juz IV, h. 11; Juz VII, h. 39; Juz I, h. 88) Al-Khathib al-Baghdadi, Juz IX, *Op. Cit*, h. 40; Ibn Hibbân, Juz I, *Op. Cit*, h. 97; Al-Khathib, *Târikh Baghdâd*, Juz IX, *Op. Cit*, h. 100; Ahmad bin Ibrahim bin Ismâ'îl bin al-Abbâs bin Murdâsi al-Ismâ'îli al-Jurjânî, *Mu'jam Usâmi Syukh Abî Bakr al-Ismâ'îli*, Jilid I, (Madînat al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hukm, 1410 H), h. 390; Abû al-Husain bin Abî Ya'la Muhammad bin Muhammad, *Thbaqât al-Hanâbilah*, Jilid I, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t,th), h. 300; Abû Ahmad bin 'Adî al-Jurjânî, selanjunya ditulis al-Jurjânî, *Al-Kâmil fi Dhu'afâ` al-Rijâl*, Juz XXII, (Beirut: Al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/1997 M), h. 416-418; Juz VII, h. 242

‘Anbasah	Periwayat III	<i>matrûk al-badîts, kâna yadha’u al-badîts, tarakubhu. matrûk al-badîts LâSya’in.” “munkar al-badîts, wâhi al-badîts”. “dba’îf”. “lâ yabillu al-ibtijaja bibi” “kadzdzâb.”</i>
Sa`id bin Zakariya	Periwayat IV	<i>mâ bibi ba`sun insya Allah dan shâlih laisa bidzazaka qawiyun, laisa bibi ba`sun, shadûq, lâ ba`sa bibi shadûq lakinnahu lam yu`raf al-badîts, laisa bibi ba`sun, laisa bisya’in dan dba’îf</i>
Abu al-Rubai` (w. 234 H)	Periwayat V	<i>tsiqah.</i>
M. bin ‘Abd Allah al-Khadhramî (w. 297 H)	Periwayat VI	<i>al-Syaikeb, al-hâfizh, al-shâdiq, mubaddîts, tsiqah, lam aزال asma’ annabu maqduhun fibi, shadûq”</i>
Al-Thabrânî (w. 360 H)	Periwayat VII	<i>Al-mubaddîts, al-faqih, al-Imâm, al-Hafidz al-Kabir al-Tsabat, tsiqoh</i>

Dari data-data dan analisis sebagaimana dipaparkan di atas, terlihat bahwa dalam jalur sanad riwayat imam al-Thabrânî ini, ada tiga periwayat yang terdeteksi memiliki ketercelaan, yaitu Sa`id bin Zakariya, ‘Anbasah bin ‘Abd al-Rahmân dan Muhammad bin Zadzân. Khusus terhadap ‘Anbasah bin ‘Abd al-Rahmân dan Muhammad bin Zadzân, para ulama memberikan penilaian ketercelaan yang tinggi, seperti *matrûk al-badîts, kâna yadha’u al-badîts, matrûk al-badîts, dba’îf, lâ yabillu al-ibtijaja bibi* dan *kadzdzâb*. Oleh karena itu, sanad hadis riwayat imam al-Thabrânî yang diteliti ini dapat dinyatakan tidak memenuhi kriteria sanad yang sah.

Itulah empat jalur sanad (dua jalur sanad riwayat imam Turmudzî, satu jalur sanad riwayat imam al-Baihaqî dan satu jalur sanad riwayat imam al-Thabrânî yang *matmya* berkaitan tentang zakat *mâl al-mustafad*. Berdasarkan data-data dan analisis yang dipaparkan di atas, terlihat bahwa sanad hadis empat riwayat tersebut tidak memenuhi kriteria sanad yang sah, atau disebut berkualitas *dba’îf*. Akan tetapi karena hadis tentang *mâl al-mustafâd* ini memiliki atau terdiri dari beberapa jalur periwayatan sanad; berarti antara yang satu dengan lainnya saling mendukung atau menguatkan maka, kualitas sanad hadis tentang *mâl al-mustafâd* ini menjadi *hasan lighairibi* (disebut hadis *hasan lighairibi*). Menurut jumhur (mayoritas) ulama, hadis *hasan lighairibi* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.

### **Kualitas Matn**

Dari sisi redaksi lafal *matn*, terlihat ada sedikit perbedaan terutama pada riwayat imam al-Baihaqî dari tiga riwayat lainnya. Yaitu pada dua riwayat imam

Turmudzi, *matmya* berbunyi “لَيْسَ عَلَى مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ”. Pada riwayat al-Thabrâni, *matmya*: “لَيْسَ عَلَى مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ”. Adapun riwayat al-Baihaqi *matmya*: “مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ”. Dengan demikian terjadi periwayatan secara *bi al-ma’na* pada hadis ini. Meski demikian, *matn* hadis ini tidak menimbulkan perbedaan atau pertentangan makna. Yakni pada intinya, *matn* hadis ini mengandung ketentuan bahwa harta perolehan (*mâl al-mustafâd*) wajib zakat jika telah sampai *haul*. Ini artinya ada ketentuan *haul* yang berlaku pada harta perolehan. Akan tetapi kemudian muncul pertanyaan “apakah kandungan hadis ini tidak bertentangan dengan Alquran dan bagaimana yang dimaksud *mâl al-mustafad* dalam hadis itu.?” Ini penting dipertanyakan, karena di dalam al-Qur’an tidak menyebut jenis *zakat mâl al-mustafad* tersebut.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa tentang persoalan zakat, Alquran tidak secara rinci menjelaskan jenis-jenis harta dari hasil usaha apa saja yang terkena wajib zakat. Demikian pula tidak merinci ketentuan teknis lainnya, seperti *haul*, nisab, dan kadarnya. Misalnya, Alquran surat al-Baqarah/2: 267 hanya menyatakan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط

“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

Pada terdapat lafal perintah (*amr*) “أنفقوا” yang oleh ulama ahli tafsir berarti “زكوا وتصدقوا”<sup>17</sup> (zakatlah/ sedekahkanlah). Sesuai dengan kaidah *ushûl*, bahwa asal dari sebuah perintah adalah wajib “الأصل في الأمر للوجوب”. Akan tetapi perintah zakat “أنفقوا” tersebut masih bersifat umum. Apalagi kelanjutan lafal ayat itu hanya menyebut “أنفقوا من طيبات ما كسبتم”, artinya sedekahkanlah atau zakatkanlah dari hasil usaha yang baik. Ini terungkap dari kata “ما” (*isim maushûl*) yang terdapat pada kalimat “أنفقوا من طيبات ما كسبتم” yang menunjukkan bahwa makna yang terkandung dalam lafal tersebut bersifat umum (*lafz al-’amm*), yang berarti artinya infakkanlah sebagian hasil yang baik dari apa-apa yang kamu usahakan. Dalam kaitan ini, apakah usaha (harta) yang diperoleh dari usaha profesi termasuk dalam keumuman kandungan lafal tersebut? atukah sudah terbatas pada jenis-jenis harta yang sudah dirumuskan para ulama klasik sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab fikihnya?

Tentang lafal yang bersifat umum ini, ‘Abd al-Wahhâb Khallâf (w.1375 H)<sup>18</sup> menjelaskan bahwa para ulama *ushûl fiqh* pada prinsipnya tidak berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan lafal umum (*’âm*) adalah lafal yang

<sup>17</sup> Al-Thabarî, Loc. Cit

<sup>18</sup> Abd al-Wahhâb Khallâf, *’Ilm Ushûl al-Fiqh*, (t.tp: al-Haramain li al-Nasyr wa Tawzi’, 1325 H/ 2004), h. 81

mencakup seluruh satuan yang berkenan dengannya. Mereka juga tidak berbeda pendapat bahwa apabila lafal ‘*ām* pada *nash syar’i*, maka ia menunjukkan pada tetapnya hukum yang *dinashbkan* terhadap seluruh satuan yang mengenainya, kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan (*takhsīb*) hukum pada sebagiannya saja. Perbedaan mereka hanyalah tentang *dilālah* (penunjukan) lafal umum (‘*ām*) yang belum ada ditemukan dalil *takhsīb* atau tidak diikuti oleh dalil *takhsīb* terhadap makna *afrād* (satuan) yang tercakup di dalamnya. Menurut ulama Hanāfiyah, penunjukan (*dilālah*) kepada seluruh satuan (*afrād*) yang dicakupnya adalah *qath’i* (دَلَالَةُ الْعَامِّ عَلَى أَفْرَادِهِ قَطْعِيَّةٌ تُوجِبُ الْحُكْمَ بِعُمُومِهِ قَطْعًا)<sup>19</sup> atau ia *qath’i* dalam keumumannya. Karenanya menurut pendapat ini, wajib mengamalkan hukum sesuai dengan apa yang dituntut oleh lafal itu. Ke*qath’i*annya berlaku selama belum terbukti pernah *takhsīb* oleh dalil yang sama bobotnya. Dengan begini, maka menurut pendapat ini tidak boleh (tidak bisa) *mentakhsīb* lafal ‘*ām* untuk pertama kali dengan *khabar* (hadis) *ahād* dan *qiyās*. Jika menuruti kaidah versi Hanfiyah ini, maka usaha profesi dapat ditetapkan sebagai bagian dari *afrād* keumuman lafal “ماكسبتم” dan boleh diamalkan.

Sementara itu ulama Syāfi’iyah dan jumbuh ulama, berpendapat bahwa *dilālah* lafal umum terhadap satuan cakupannya bersifat *ḡhannī*, baik ia sebelum maupun sesudah *takhsīb*. Menurut pendapat ini, tidak wajib beramal dengan lafal ‘*ām*, sampai adanya dalil yang *mentakhsīb*nya. Hal ini karena menurut hasil penelitian mereka terhadap atau *nash-nash syar’iyyah* yang di dalamnya terdapat lafal-lafal yang umum menunjukkan bahwa tidak ada lafal umum yang ada dalam al-Qur’an kecuali ia telah *takhsīb*. Karena itu di kalangan mereka populer ungkapan “tidak ada teks yang umum kecuali telah *takhsīb* (ما من عام الا وقد خصص)<sup>20</sup> Dalam kaitan ini, boleh saja *mentakhsīb* lafal ‘*ām* dengan *khabar ahād* dan *qiyās*.

Adapun jika dilihat dari sisi pendapat golongan ulama Syāfi’iyah, pada asalnya memang lafal umum “ماكسبتم” memerlukan dalil yang mengkhusus (*takhsīb*) kannya, dan telah ada dalil hadis yang “*mentakhsīb*nya”, yaitu bahwa “usaha apa saja” yang dimaksud dalam kandungan makna “ماكسبتم” adalah usaha perdagangan, emas, perak, dan binatang ternak. Akan tetapi menurut Ibn al-Subkī (w.771 H), *takhsīb* berlaku jika jelas terjadi perbedaan antara dalil *takhsīb* dengan ‘*ām*. Beliau dengan jelas menyakatan:

لِلزُّومِ مَعْنَى اللَّفْظِ لَهُ قَطْعًا حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُهُ مِنْ تَخْصِيصٍ فِي الْعَامِّ<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Al-Zarkasyī, Badr al-Dīn Muḥammad bin ‘Abd Allah, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fi Ushūl al-Fiqh*, Juz IV, t.tp: Dār al-Kutubi, t.th, h. 35

<sup>20</sup> Al-Namlah, Abd al-Karīm bin ‘Ali bin Muḥammad, Juz IV, *Al-Muḥadḍḍab fī ‘Ilm Ushūl al-Fiqh al-Muqāran*, Riyadh: Dār al-Nasyr, Maktabah al-Rusyd, 1420 H/1999 M, h. 1515

<sup>21</sup> Ibn Subkī, Taj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb bin Taqī al-Dīn al-Subkī, Juz I, *Jam’u al-Jawāmi’*, disyarah oleh al-Maḥalli dan dihasyiah oleh al-Athār, t.tp: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th, h. 515

“Makna lafa ‘am akan tetap qath’i sampai jelas terlibat adanya perbedaan dari takhsish di dalam lafal ‘am.”

Kalau demikian halnya, maka jika dicermati kembali dali-dalil hadis yang seperti halnya “mentakhsish” lafal “ماكسبتم”, (yaitu usaha *tijârah*/perdagangan, emas, perak dan ternak), sesungguhnya tidaklah bertentangan dalam makna umum dari lafal itu. Maksudnya, wajibnya zakat hasil tersebut yang termasuk *afîd-afîd* dari lafal umum “ماكسبتم” (*apa-apa saja yang kamu usahakan*), tersebut sejalan dengan tuntunan keumuman makna lafal “ماكسبتم” yang menyuruh menzakatkan dari “*apa-apa saja yang kamu usahakan*”/ماكسبتم. Jadi tidak ada terjadi pertentangan di dalamnya. Dalam kaitan ini, jumbuh ulama menyatakan:

ذَكَرَ بَعْضُ أَفْرَادِ الْعَامِّ الْمُؤَافِقِ لَهُ فِي الْحُكْمِ لَا يَفْتَضِي التَّخْصِيصَ عِنْدَ الْجُمُهورِ بَلِ الْأَوَّلُ بَاقٍ عَلَى مُؤْمِهِ<sup>22</sup>

“Menyebut sebagian *afîd ‘am* sesuai dengan hukum yang ada baginya, maka menurut jumbuh ulama, tidak menuntut adanya takhsish, tetapi tetap pada awal keumuman.”

Melihat adanya ketentuan tentang takhsish sebagaimana dikemukakan oleh para ulama *ushûl* di atas, maka sesungguhnya dapat dikatakan bahwa pada lafal ayat dalam QS al-Baqarah/2 ayat 267 tidak berlaku takhsish, dan karenanya yang berlaku adalah keumuman makna yang terkandung dalam lafal itu, yakni *mâl al-mustafad* termasuk hasil usaha yang terkena wajib zakat. Jika demikian halnya maka ketentuan kandungan hadis tentang “*mâl al-mustafad*” wajib, tidak bertentangan dengan Alquran. Itu berarti *matn* tersebut dapat dinyatakan sah.

Selanjutnya apa dan bagaimana sesungguhnya yang dimaksud dengan *mâl al-mustafad* itu? Secara harfiah, kata *al-mustafad* (bahasa Arab) merupakan bentuk *maf’ûl* dari akar kerja *istafâda* yang artinya memperoleh. Jadi *mâl al-mustafad* artinya harta perolehan atau harta pendapatan. Istilah ini, agaknya muncul dikarenakan adanya hadis Nabi SAW yang menyebut “من استفاد مالا” sebagaimana pada awal hadis tersebut. Dalam kaitan ini, jika dirujuk kepada kitab-kitab fikih klasik, ternyata istilah *mâl-mustafad* ada, dan digunakan ketika membicarakan tentang harta perolehan atau harta baru yang diperoleh di tengah masa perhitungan masa *haul* (المال المتجدد أثناء الحول). Persoalan itu muncul, atau penambahan harta itu terjadi di tengah masa perhitungan *haul*, melalui cara pembiakan hewan ternak atau keuntungan harta yang diperniagakan, pembelian,

<sup>22</sup>*Ibid* (Ibn Subkî), Juz II, h. 69; Juga, Al-Zarkasyî, Juz IV, *Op. Cit*, h. 304; Al-Syaukânî, Juz I (t.tp: Dâr al-Salâm, 1430 H/2009 M), h. 336; Juga, ‘Abd al-Qâdir bin Ahmad bin Musthofa bin ‘Abd al-Rahîm bin Muhammad Badrân, *Al-Madkhal ilâ Madzhab al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, (Beirût: Mu`assasat al-Risâlah, 1401 H), h. 245

pemberian dan waris.<sup>23</sup> Para ulama Syâfi'iyah, Mâlikiyah dan Hanâbilah, pada prinsipnya memiliki pandangan sama tentang *mâl al-mustafâd* ini. Begitu juga para ulama fikih kontemporer umumnya, berpandangan yang sama ulama fikih klasik tentang persoalan *mâl al-mustafâd* ini.<sup>24</sup> Jadi jika mengacu kepada pemahaman ulama klasik tentang *mâl al-mustafâd* ini, maka dapat dikatakan bahwa gaji atau upah tidak masuk kategori *mâl al-mustafâd*, karena ia merupakan harta yang diperoleh sebagai pembayaran atau upah dari pekerjaan dengan keahlian (profesi) yang dimiliki seseorang. Kalaupun ada yang berpendapat hasil usaha profesi termasuk *mâl al-mustafâd*, maka sesuai teks hadis tersebut, berlaku ketentuan haul baginya.

### Analisis Penggunaan Dalil Qiyâs

Zakat merupakan ibadah *mahdhab* yang berkenaan langsung dengan harta. Berkaitan dengan hal ini, dalam kajian hukum Islam (fikih) ditemukan ada ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada jenis harta yang terkena wajib zakat, yakni ketentuan *haul*, *nisab* dan kadar harta. *Haul*, adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu (mencapai) satu tahun. Sedangkan nisab adalah suatu takaran yang telah mencapai guna wajib zakat, atau batasan minimal yang harus dicapai terkait suatu harta kekayaan sehingga seseorang memiliki kewajiban untuk melakukan zakat. Adapun kadar, adalah ukuran atau jumlah harta yang akan dikelurkan zakatnya. Sebagian jenis harta wajib zakat, ada yang berlaku ketentuan *haul* dan nisab, misalnya zakat emas, perak, binatang ternak dan perdagangan. Namun sebagian lain, ada yang ada ketentuan *haul* baginya, melainkan hanya berlaku ketentuan nisab, misalnya zakat hasil pertanian. Maksudnya, zakat hasil dikeluarkan (bila cukup nisab) pada saat panen, tanpa menunggu waktu satu tahun setelah memperoleh atau memiliki hasil panen tersebut.

Dalam kaitannya dengan adanya ketentuan haul, nisab dan kadar pada pelaksanaan zakat, terlihat bahwa di kalangan yang berpendapat hukum zakat profesi wajib terdapat perbedaan (keragaman) pendapat. *Pertama*, ada yang berpendapat bahwa pada zakat profesi tidak ada *haul*, nisabnya sejumlah nisab hasil pertanian, dan kadarnya sejumlah kadar zakat emas (2 1/2 %). Misalnya, terlihat pada fatwa Dewan Syariah PKS. *Kedua*, ada yang berpendapat bahwa ketentuan *haul*, nisab dan kadar sama dengan ketentuan zakat emas. Jadi di sini terbaca bahwa dalam penetapan ketentuan *haul*, *nisab* dan kadar zakat profesi, kalangan yang berpendapat zakat profesi hukumnya wajib, melakukan penyamaan

---

<sup>23</sup> Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsa bin Aḥmad bin Ḥusain al-Ghaitâbî al-Hanafî, *Al-Binâyat Syârh al-Hidâyah*, Juz III, (Beirût-Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1430 H/ 2000 M), h. 354

<sup>24</sup> Sayyid Sâbiq, Juz I, *Fiqh al-Sunnah*, Beirût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1397 H/1997 M h. 377-378

kepada ketentuan zakat hasil pertanian dan zakat emas. Dalam kajian teori hukum Islam (*ushûl al-fiqh*), proses penetapan hukum dengan cara “membandingkan dan menyamakan suatu kasus (*case*) yang belum ada ketetapan hukumnya dalam *nash*, kepada kasus yang telah ada ketetapan hukumnya dalam *nash*” disebut *qiyâs*. Kasus (*case*) yang belum ada ketetapan hukumnya dalam *nash*, yang dalam kaitan ini “zakat profesi” disebut dengan *maqâs*. Sedangkan kasus yang telah ada ketetapan hukumnya dalam *nash*, dalam kaitan ini zakat pertanian dan zakat emas disebut “*maqâs ‘alaihb*”.

*Qiyâs* memang merupakan salah satu dalil metode ijtihad atau dalil *syar’i* yang disepakati oleh para ulama *ushûl*. Dalam kaitan ini, para ulama *ushûl* telah membuat beberapa aturan atau ketentuan (kaidah) terkait tentang penggunaan metode *qiyâs* dalam merumuskan hukum. Ketentuan itu antara lain, harus terpenuhinya empat rukun *qiyâs*, yakni *al-ashl*, *hukm ashbl*, (keduanya disebut *maqâs ‘alaihb*), *far’u* dan *‘illat*, yang pada setiap rukun memiliki sub syarat atau ketentuan tersendiri. Jika salah satu rukun itu tidak terpenuhi, maka *qiyâs* tidak dapat dilakukan dan atau *qiyâs* dianggap tidak sah. Jika dilihat dari sisi ini, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah meng*qiyâs*kan persoalan *haul* dan nisab zakat profesi kepada zakat pertanian dengan ketentuan metode *qiyâs* yang telah dirumuskan oleh para ulama *ushûl al-fiqh*?

Pada kasus atau persoalan ini, hasil usaha profesi dapat disebut sebagai *far’u*, sedangkan dalil Alquran dan hadis mengenai ketentuan *haul* pengeluaran zakat pertanian, dijadikan sebagai *maqâs ‘alib (al-hukm wa al-ashl)*. Akan tetapi selanjutnya, apakah terdapat kesamaan sifat antara *ashl* (yakni hasil usaha pertanian yang ketentuan haul dan nisab zakat pertanian yang sudah *manshûsh*) dan *far’u* (yakni haul dan nisab hasil usaha profesi tidak ada *nashnya*)?. Hal ini penting karena, ada atau tidaknya kesamaan sifat (*‘illat*) antara *ashl* dan *far’u* untuk menentukan sah atau batalnya *qiyâs* yang digunakan. Dalam kaitan ini untuk menguji apakah ketentuan *haul* dan nisab zakat profesi dapat di*qiyâs*kan kepada *haul* dan nisab zakat pertanian, akan dianalisis dan dibandingkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Hasil usaha pertanian baru bisa dipanen atau diperoleh setelah berjalan 3-4 bulan. Sedangkan hasil usaha profesi dapat diperoleh setiap bulan. Di sini terdapat dari sisi perbedaan waktu perolehan.
2. Pada hasil pertanian, ada perbedaan ketentuan kadar zakat, yakni antara tanaman pertanian yang tidak memakai biaya pengairan atau cukup mengandalkan hujan, dan tanaman yang memakai biaya pengairan. Tanaman pertanian yang tidak memakai biaya pengairan, maka zakatnya adalah 10%,. Adapun tanaman yang memakai biaya pengairan, zakatnya adalah 5% . Ketentuan seperti ini tidak ada dan tidak bisa diberlakukan pada hasil usaha profesi.

3. Zakat pertanian, dihitung dari hasil bersih. Sedangkan zakat profesi dihitung dari penghasilan hasil kotor.

Dari analisis perbandingan di atas, ternyata terlihat ada hal (sifat atau ketentuan) yang terdapat pada *ashl* (*maqās 'alaih*) yang tidak bisa diberlakukan pada *far'u*. Ini berarti terdapat perbedaan (*fâriq*) antara *ashl* dan *far'u*, atau 'illat yang terdapat pada *far'u* tidak sebanding dengan 'illat yang terdapat pada *ashl*. Pada hal menurut para ulama *ushûl*, diantara syarat 'illat yang harus terpenuhi dalam melakukan *qiyâs* adalah bahwa 'illat bagi hukum *ashl* mestilah terdapat juga di dalam hukum cabang (*far'u*), atau 'illat yang terdapat pada *ashl* semestinya bisa diterapkan pada *far'u*. Dalam kajian *ushûl al-fiqh*, jika 'illat hukum asal tidak sama, tidak sebanding atau tidak terdapat di dalam hukum cabang (*far'u*), maka *qiyâs* tersebut dinamakan sebagai *qiyâs ma'a al-fâriq*, dan menurut para ulama ahli *ushûl al-fiqh*, *qiyâs ma'a al-fâriq* ini adalah *qiyâs fâsid* (*qiyâs* yang rusak) *lâ yuhatajju bihi* (tidak dapat menjadi hujjah).<sup>25</sup> Berdasarkan analisis ini, maka penetapan ketentuan tidak ada *haul* dan nisab bagi zakat profesi, dengan melakukan *qiyâs* kepada zakat pertanian, merupakan *qiyâs ma'a al-fâriq* (*qiyâs* yang tidak sebanding atau tidak nyambung) yang dalam kajian *ushûl al-fiqh* dianggap batal atau tidak sah.

Adapun jika, persoalan tentang ketentuan *haul*, nisab dan kadar zakat profesi di *qiyâs*kan kepada zakat emas, dapat dianalisis sebagai berikut. Emas dan perak, sebagaimana dimaklumi, pada hakikatnya merupakan benda atau harta berharga dan berfungsi sebagai alat tukar nilai atau dapat menjadi alat tukar dalam melakukan transaksi jual beli. Karena itu dalam syariat Islam, ia menjadi atau termasuk harta kekayaan tersimpan yang terkena wajib zakat. Sementara itu di sisi lain terlihat bahwa, pada umumnya hasil usaha (gaji atau upah) dari jasa profesi yang diterima adalah dalam bentuk uang. Uang juga ternyata pada hakikatnya merupakan sesuatu (benda) bernilai atau berharga yang dapat menjadi alat tukar dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian dari wujudnya, terlihat bahwa antara emas, perak dan uang memiliki kesamaan sifat. Oleh karena terlihat ada kesamaan dengan emas dan perak, uang juga dapat menjadi suatu harta kekayaan. Berdasarkan analisis dan perbandingan ini, maka dapat dikatakan bahwa penetapan *haul*, nisab kadar zakat profesi yang di *qiyâs*kan kepada kadar zakat emas dan perak, dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan kaidah *qiyâs*, dan karenanya dapat diterima. Dengan kata lain berarti penggunaan *qiyâs* sebagai dalil penetapan *haul*, nisab kadar zakat profesi dapat dikatakan tepat dan akurat, *wallahu a'lam bishowab*.

---

<sup>25</sup>Syihâb al-Dîn Ahmad bin Idrîs bin 'Abd al-Rahmân al-Mâlikî al-Qarâfî, *Al-Furûq*, Juz III (t.tp: 'Ālim al-Kutub, t.th). h. 185

## Penutup

Berdasarkan data dan analisis sebagaimana dipapar terdahulu dapat diambil beberapa simpulan. *Pertama*, hadis riwayat imam Tirmidzî, al-Thabrânî dan al-Baihaqî tentang *mâl al-mustafâd*, sanadnya tidak memenuhi kriteria hadis sahih. Akan tetapi karena hadis tentang *mâl al-mustafâd* ini memiliki atau terdiri dari beberapa jalur periwayatan sanad; yang berarti antara yang satu dengan lainnya saling mendukung atau menguatkan maka, kualitas sanad hadis tentang *mâl al-mustafâd* ini menjadi *hasan lighairibi* (disebut hadis *hasan lighairibi*), dan karenanya dapat dan tepat (valid) digunakan sebagai dalil menetapkan hukum wajib zakat profesi.

*Kedua*, penggunaan dalil qiyâs kepada zakat pertanian dalam menetapkan ketentuan *haul* dan nisab zakat profesi tidak tepat (tidak memenuhi syarat dan prosedur *qiyâs*). Sedangkan penggunaan dalil qiyâs kepada zakat kepada zakat emas dalam menetapkan ketentuan *haul* dan nisab zakat profesi dapat dikatakan tepat (memenuhi syarat dan prosedur qiyâs). *wallahu a'lam bisshowab*.

## Daftar Pustaka

- Abî Hâtîm Abû Muhammad ‘Abd al-Rahmân ibn Muhammad ibn Idrîs ibn al-Mundzir al-Tamîmî al-Hanzhalî al-Râzî ibn, *Al-Jarh wa al-Ta’dîl*, Beirut: dar Ihya’ al-Turâts, 1271 H/1952 M
- Abî Ya’la, Abû al-Husain Muhammad bin Muhammad, *Thbaqât al-Hanâbilah*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t,th
- Al-Asqallânî, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Taqrîb al-Tabdzîb*, Suriya: Dâr al-Rasyîd, 1406 H/1986 M
- ....., *Tabdzîb al-Tabdzîb*, India: Mathbaat Dâ’irat al-Ma’ârif al-Nizhâmiyah, 1326 H
- ....., *Al-Ishâbah fî Tamyîz al-Shahâbah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1415 H
- ....., *Lisân al-Mizân*, Beirut-Lebanon, Mu`assasat A’lamî lilmatbû’ât, 1390 H/197
- Badrân ‘Abd al-Qâdir bin Ahmad bin Musthofa bin ‘Abd al-Rahîm bin Muḥammad, *Al-Madkhal ilâ Madzhab al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Mu`assasat al-Risâlah, 1401 H, h. 245
- Al-Baihaqî, Ahmad bin al-Hasan bin ‘Ali bin Mûsa al-Khurrasânî, *Sunan al-Kubra*, (Beirut-Lebanon; Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M
- ....., *Ma’rifat al-Sunan wa al-Atsar*, Damaskus: Dâr Qutaibah, 1999

- Al-Bukhârî Muḥammad Ismâ'il bin al-Mughîrah, *Al-Târikh al-Kabîr li al-Bukhârî*, Hydrabat: Dâr al-Ma'ârif al-'Usmâniyah, t.th
- Al-Dzahabî, Syam al-Dîn Abû 'Abd Allah Muḥammad bin Aḥmad, *Al-Kâsyif fî Ma'rifat Manlabu Rivâyat fî al-Kutub al-Sittah*, Beirût-Lebanon: Dâr al-Ma'rifat li al-Thabâ'at wa al-Nasyr, Jedah: Dâr al-Qiblat li al-Tsaqâfat al-Islâmiyah – Muassasat 'Ulûm al-Qur'an, 1413 H/1992 H
- ....., *Al-Mizân wa al-I'tidâl*, (Beirût-Lebanon: Dâr al-Ma'rifat li al-Thabâ'at wa al-Nasyr, 1382 H/1963
- ....., *Tadzkirot al-Huffâzh*, Jilid VI, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M). H. 69
- ....., *Siyar A'lam al-Nubalâ*, (Muassasah al- Risâlah, cetakan ketiga 1405 H 1985 M, 169
- Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera*, Bandung: Harkatuna Publishing, 2006
- Fatwa MUI Fatwa MUI Nomor: 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan; Musyawarah Nasional Tarjih XXV 1421 H/ 2000 M
- Al-Ghaitâbî Maḥmûd bin Aḥmad bin Mûsa bin Aḥmad bin Husain al-Hanafi, *Al-Binâyat Syârh al-Hidâyah*, Beirût-Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1430 H/ 2000 M
- Al-Hâkim, Abû 'Abd Allah al-Naisâbûrî, *Al-Mustadrak 'ala shahihain*, Kairo:Dâr al-Haramain li al-Thba'ah wa al-Tauzi', 1997
- Khallâf, Abd al-Wahhâb, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (t.tp: al-Haramain li al-Nasyr wa Tawzi', 1325 H/ 2004
- Al-Khathîb al-Baghdâdî, Abû Bakar Ahmad bin Ali bin Tsâbit bin Ahmad bin Mahdî, *Târikh Baghdâd*, Beirût: Dâr al-Gharbi al-Islâmî, 1422 H/2002
- Ibn Hîbbân Muhammad ibn Ahmad ibn Mu'adz ibn Ma'dan al-Tamîmî Abû Hâtîm al-Darâmî al-Bustî, *Al-Tsiqât li Hîbbân*, (t.tp: Dar al-Ma'arif al-'Utsmaniyyah, 1393 H/1973 M
- Ibn al-Mundzir Abû Muhammad 'Abd al-Rahmân ibn Muhammad ibn Idrîs al-Tamîmî al-Hanzhalî al-Râzî ibn Abî Hâtîm, *Al-Jarḥ wa al-Ta'dîl*, (Beirût: dar Iḥyâ' al-Turâts,1271 H/1952 M
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zaad al-Ma'at fî Hadî Khair al-'Ibad*, Juz II, (Beirût: Mua'ssasat al-Risâlah, 1415 H/1994 M
- Ibn Qudâmah, *al Muqbnî*, Kairo: Makatabah al-Qahira, 1388 H/ 1968 M
- Ibn Subkî, Taj al-Dîn 'Abd al-Wahhâb bin Taqî al-Dîn al-Subkî, *Jam'u al-Janâmi'*, disarah oleh al-Maḥalli dan dihasyiah oleh al-Athâr, t.tp: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th

- Al-Jurjânî, Abû Ahmad bin ‘Adî, *Al-Kâmil fî Dhu’afâ` al-Rijâl*, (Beirût-Lebanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/1997M
- Al-Jurjânî Ahmad bin Ibrâhîm bin Ismâ`îl bin al-Abbâs bin Murdâsi al-Ismâ`îli, *Mu’jam Usâmi Syukh Abî Bakr al-Ismâ`îli*, Madînat al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulûm wa al-Hukm, 1410 H
- Al-Mizzî, Yûsuf ibn ‘Abd al-Rahmân ibn Yûsuf Abû al-Hajjâj Jamâl al-Dîn ibn al-Zakî Abî Muhammad al-Qâdhî al-Kilabî, *Tabdżîb al-Kamâl fî Asmâ al-Rijâl*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1400 H/1980 M
- Al-Namlah, Abd al-Karîm bin ‘Ali bin Muḥammad, *Al-Muhadzżab fî ‘Ilm Ushûl al-Fiqh al-Muqâran*, Riyadh: Dâr al-Nasyr, Maktabah al-Rusyd, 1420 H/1999 M
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1397 H/1997 M
- Al-Syaukânî, Muḥammad bin ‘Ali bin Muḥammad, *Iryâd al-Fuhûl*, Kairo: Dâr al-Salâm, 1430 H/2009 M
- Al-Syirâzî, Abû Ishâq Ibrâhîm bin ‘Alî bin Yûsuf *Al-Tanbiyah fî al-fiqh al-Syâfi’î*, t.tp: ‘Ālim al-Kutub, t.th
- Al-Thabarî Muḥammad bin Jarîr bin Yazîd bin Katsîr bin Ghalîb, *Jâmi` al-Bayân fî Ta`wîl al-Qur`ân*, Juz V, (t.tp: Muassasat al-Risâlah, 1420 H/2000 M
- Al-Thabrânî Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb bin Mathîr al-Lakhmî, Abû al-Qâsim, *Al-Mu’jam al-Kabir*, (Kairo: Dâr al-Nasyr Maktabah Ibn Taymiyyah, 1415/1994
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994
- Al-Qarâfî Syihâb al-Dîn Ahmad bin Idrîs bin ‘Abd al-Rahmân al-Mâlikî, *Al-Furûq*, t.tp: ‘Ālim al-Kutub, t.th
- Al-Zarkasyî, Badr al-Dîn Muḥammad bin ‘Abd Allah, *Al-Bahr al-Mubîth fî Ushûl al-Fiqh*, t.tp: Dâr al-Kutubi, t.th
- Wensinck, A. J, *Al-Mu’jam al-Mufabras li Alfâzih al-Sunnah al-Nabanî*, Jilid V, Leiden: E.J Brill, 1965